

## NASIONALISME "DALAM PERSPEKTIF ISLAM"

Oleh: Abdul Choliq Murod  
Perguruan Futuhiyyah Semarang

### ABSTRACT

*Many people think that Islam is identified as internationalism, not as nationalism. But historically proved internationalism of Islam as political power had been collapse after the World War I following the fall of Turkish Calip in 1924. Considering the fact that at most part of the world Islam had close connection with local political entities. This connection obliges Islam to develop discourse on nationalism.*

**Key word:** nasionalism, internationalism, religion politization, political religionization

### I. PENDAHULUAN

Keberagaman merupakan anugerah Tuhan dan merupakan keniscayaan yang harus diterima karena merupakan *sunnatullah* (hukum alam), banyak disalah-artikan dan disalah-gunakan, termasuk dalam hal ini adalah eksistensi berbagai macam etnis di dunia. Dengan landasan rasa cinta dan penghargaan yang tinggi terhadap etnisnya maka muncullah berbagai kasus *genoside* terhadap etnis lain. Sejarah mencatatnya mulai dari tindakan pendatang Spanyol dan Inggris terhadap penduduk asli Indian di Amerika, Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi, Bangsa Serbia terhadap bangsa Bosnia pada awal dekade 1990-an, Suku Tutsi terhadap Suku Hutu di Rwanda.

Agama yang seharusnya menjadi landasan bagi suatu kaum untuk bertindak baik, ternyata seringkali menjadi alasan pokok bagi terjadinya konflik yang berkepanjangan. Hal itu disebabkan agama dipandang secara eksklusif dari sudutnya sendiri. Kondisi itulah yang akan menimbulkan kecintaan yang mendalam dan membabi-butakan kepada agamanya pada satu sisi. Efek lainnya akan menimbulkan perasaan anti toleran terhadap agama dan kepercayaan

lain. Pada titik inilah akan timbul konflik dan perang atas nama agama. Terjadinya Perang Salib di Palestina, Konflik antara di Irlandia Utara, kekacauan di Maluku dan di Poso, semuanya dipicu oleh faktor agama.

Teralienasinya suatu etnis, maupun agama dari percaturan internasional. Ditambah dengan sempitnya wawasan dan pandangan suatu kelompok akan menimbulkan munculnya kecintaan yang sempit dan membabi-butakan terhadap kelompoknya sendiri. Pada sisi lain akan menimbulkan pula rasa takut yang berlebihan apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya. Fenomena inilah yang akan menyebabkan timbulnya nasionalisme yang sempit, atau seringkali pula disebut sebagai *chauvinisme*.

Nasionalisme sebagai manifestasi kecintaan dan kesetiaan tertinggi kepada tanah air, negara, dan bangsa merupakan modal dasar bagi pembentukan negara, dan karakter bangsa. Nasionalisme yang menjadi dasar pembentukan negara dan karakter bangsa adalah nasionalisme yang menghargai pluralisme, humanisme, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Konsep nasionalisme seperti itulah yang disebut sebagai nasionalisme

positif bukan nasionalisme sempit sebagaimana yang dipahami oleh Jorg Haider pemimpin partai politik sayap kanan Austria yang anti Imigran. Contoh lain nasionalisme sempit dapat dilihat pada diri Gianfranco Fini salah satu pimpinan partai koalisi yang memerintah Italia pada tahun 1994. Pandangannya yang memuja Mussolini sebagai negarawan terbaik abad ini, jelas menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang penganut nasionalisme sempit atau bahkan chauvinisme.

Nasionalisme merupakan fenomena abad modern walaupun akar-akar nasionalisme dapat dirunut sejak zaman Yunani kuno, dan mencapai puncaknya pada abad ke dua puluh. Sedangkan di Indonesia Nasionalisme dapat kita temukan pada organisasi Boedi Oetomo yang walaupun tujuan awalnya sebagai himpunan orang Jawa dan Madura (etno nasionalisme) tetapi nilai-nilai nasionalisme diajarkan didalamnya. Para founding fathers kita juga selalu mendengungkan nasionalisme dalam rangka perjuangan untuk meraih kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan Belanda. Kecintaan terhadap tanah air merupakan ajaran Islam yang sangat mendasar sejajar dengan kecintaan terhadap agama. Bermula dari itulah maka kita dapat saksikan bagaimana para ulama, kyai dan guru ngaji sangat gigih menentang kolonialisme Belanda, sampai mereka mengeluarkan fatwa haram memakai pantaloon dan dasi karena menyerupai penjajah yang kafir. Dengan dasar pandangan yang seperti itu, dapat dipahami bahwa KH Hasyim Asy'ari sampai mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1945 dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Kecintaan terhadap tanah air inilah yang mampu membuat orang-orang Islam lentur terhadap *local*

*wisdom* (kebijaksanaan local) sehingga bahu membahu dengan komponen bangsa lain dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan utama dalam artikel ini adalah apa arti nasionalisme itu, bagaimana hubungan antara nasionalisme dan gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana hubungan antara nasionalisme dan Islam di Indonesia.

## II. METODE

Metode yang dipergunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan cara mempelajari berbagai buku dan teks yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini. Melalui cara itu, dapat dikaji dan dibahas berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masalah nasionalisme dan Islam. Melalui cara itu pula dapat dianalisis hubungan antara gerakan nasionalisme dan Islam di Indonesia, bagaimana keduanya saling mempengaruhi, seperti apa hasilnya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap bentuk nasionalisme di Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

## III. PEMBAHASAN

### A. Arti nasionalisme

Secara etimologis kata nasionalisme, akar katanya *national* yang diambil dari *natio* yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata *natio* berasal kata *nascie* yang berarti dilahirkan. Nation atau bangsa menurut Hans Kohn adalah golongan-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lainnya, seperti

kesamaan keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adapt istiadat, tradisi, perasaan dan agama. Akan tetapi tidak satupun diantara faktor-faktor itu bersifat mutlak guna merumuskan bentuk dasar sebuah bangsa.

Menurut Benedict Anderson bangsa adalah komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dicita-citakan atau diangankan. Komunitas politik dikatakan sebagai *imagined*, karena anggota komunitas tidak pernah saling mengenal, saling bertemu, atau bahkan saling mendengar. Hal yang ada dalam pikiran masing-masing anggota komunitas hanyalah angan-angan tentang komunitasnya. Suatu bangsa akan terbentuk jika sejumlah besar warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan.

Dalam pandangan Ernest Renan bangsa adalah kesatuan, solidaritas yang digantungkan atas kehendak warganya untuk secara bersama dalam identitas kolektif baru yang melampaui garis-garis primordial sektarian. Renan mengemukakan bahwa bangsa tidak disamakan dengan kesatuan manusia yang didasarkan atas kesamaan ras, bahasa, agama, dan geografi. Sedangkan menurut Joseph Stalin bangsa merupakan suatu komunitas yang terbentuk dari bahasa, wilayah, kehidupan ekonomi dan psikologis yang stabil dan berkembang secara histories termanifestasi dalam suatu komunitas kebudayaan.

Nasionalisme menurut Hans Kohn adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sebelum lahirnya nasionalisme, kesetiaan orang tidak ditunjukkan kepada negara bangsa tetapi ditujukan kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja, kesatuan ideologi

seperti suku, negara kota, kerajaan dinasti atau gereja.

Hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo. Menurutnya nasionalisme adalah ideologi yang mencakup lima prinsip yaitu *unity* (kesatuan) yang merupakan syarat yang tidak bias ditolak, *liberty* (kemerdekaan) termasuk kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat, *equality* (persamaan) bagi setiap warga untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing, *personality* (kepribadian) yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa, dan performance dalam arti kualitas atau prestasi yang dibanggakan kepada bangsa lain.

Sedangkan menurut Gellner nasionalisme adalah suatu perjuangan untuk membuat budaya dan perpolitikan menjadi bersesuaian. Nasionalisme adalah pemaksaan umum suatu tradisi besar kehidupan masyarakat. Hal itu sesungguhnya berawal dari tradisi kecil yang sebelumnya telah mengangkat kehidupan mayoritas dan dalam beberapa kasus keseluruhan penduduk.

Menurut Ensiklopedi Indonesia nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dan dengan demikian merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa.

Dengan demikian kata kunci dalam nasionalisme adalah kesetiaan, yang muncul karena adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan lainnya. Pada kebanyakan kasus kesetiaan itu terjadi karena kesamaan keturunan, kebudayaan, bahasa. Akan tetapi semua unsur bukanlah unsur yang substansial, sebab yang ada dalam nasionalisme adalah kemauan untuk bersatu.

Dalam pandangan Organski nasionalisme berkembang melalui empat fase. Tahap I dari perkembangan politik kesatuan nasional primitive. Fase II dari tahap perkembangan politik industrialisasi. Fase III dari tahap perkembangan politik kesejahteraan nasional. Fase IV dari tahap perkembangan politik kemakmuran.

Sedangkan cita-cita nasionalisme menurut Hertz ada empat macam:

1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan dalam politik, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta solidaritas.
2. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau campur tangan dari dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang bersifat anti nasional atau yang hendak mengesampingkan bangsa dan negara.
3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (*separateness*), pembedaan (*distinctiveness*), individualitas dan keaslian (*originality*).
4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan diantara bangsa-bangsa yang memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.

## **B. Nasionalisme Indonesia**

### **1. Nasionalisme di Era Pra-Kemerdekaan**

Semangat nasionalisme Indonesia sudah mulai terasa pada saat berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. walaupun organisasi ini pada awalnya didirikan oleh para pelajar dan mahasiswa Jawa dan Madura tapi orang lainpun bisa masuk. Nama itu punya arti cendekiawan, watak atau kebudayaan yang mulia. Boedi Oetomo menetapkan perhatiannya pada penduduk Jawa dan Madura, dengan

bahasa *melayu* sebagai bahasa resminya. Organisasi ini mengilhami berdirinya banyak organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes yang pada puncaknya mereka mengikrarkan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia, walaupun sumpah pemuda bukan identik dengan nasioanlisme tetapi merupakan kebersamaan dalam pluralitas yang sangat dibutuhkan dalam usaha mengintegrasikan bangsa, yang berarti sejalan dengan hakikat nasionalisme.

Sebelum sumpah pemuda menurut Sartono Kartodirjo, pada tahun 1925 tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia telah mengeluarkan manifesto politik yang mendeklarasikan ideologi nasional yang mendasar yaitu:

- a. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih oleh mereka sendiri.
- b. Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun.
- c. Tanpa persatuan yang kokoh dari pelbagai unsur rakyat maka tujuan perjuangan ini sulit dicapai

Setelah Boedi Oetomo, lahir Sarekat Islam pada tahun 1912 yang menitikberatkan pada hubungan spiritual agama dan perdagangan yang berkembang menjadi gerakan nasionalisme rakyat yang pertama di Indonesia. S.I. pecah menjadi dua, yaitu S.I. putih yang mengutamakan idiologi Islam dan Pan Islamisme, dan S.I. merah di bawah Semaun, Darsono, dan Tan Malaka yang cenderung kekiri, yang akhirnya menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia yang berpegang pada sosialisme dan internasionalisme dan menganggap nasionalisme sebagai musuh. Pada waktu dirinya merasa kuat PKI melakukan pemberontakan pada 13 November 1926, tetapi kalah dan dibubarkan oleh pemerintah kolonial.

Pada 25 Desember 1912 lahir partai yang berjiwa nasionalis yaitu *Indiche Partij* yang didirikan oleh Douwes Dekker, tetapi tidak mendapat sambutan rakyat.

Pada 4 Juli 1927 Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan wadah nasionalisme modern yang radikal. Ideologi partai tersebut nasional radikal, yang dalam pandangan Bung Karno dianggap bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme (NASAKOM).

Setelah itu, diikuti kelahiran banyak organisasi, baik yang bercorak keagamaan, politik maupun kepemudaan, seperti Muhammadiyah (18 November 1912), Nahdlotul Ulama (31 Januari 1926), Christelijke Ethische Partij (1916), Indiche Katholieke Partij (1918), Jong Java (1915), Jong Sumatera Bond (1917), dll.

Lahirnya beraneka ragam organisasi dapat dikatakan bahwa nasionalisme sudah mulai tumbuh karena senasib sependeritaan, yang menginginkan bebas dari penjajahan Belanda, dan ingin mewujudkan cita-cita yaitu masa depan yang lebih baik, yang oleh Anderson disebut *Imagined Political Community*.

Nasionalisme mencapai puncaknya saat dibentuknya BPUPKI pada 1 Maret 1945. Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang beranggotakan 60 orang. Pada awalnya yang akan menjadi ketua adalah Ir. Soekarno, tetapi dengan alasan tertentu akhirnya ditunjuk Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua dengan wakilnya R.P. Soeroso, tujuannya pembentukannya adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan Negara Indonesia Merdeka.

Pada sidang BPUPKI yang pertama dibicarakan tentang berbagai macam pendapat mengenai dasar negara yaitu pendapat Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan lima dasar Negara yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Soepomo mengusulkan dasar Negara adalah Integralistik yaitu Negara bersatu dengan rakyat yang mengatasi seluruh golongan dalam lapangan apapun. Sedangkan Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar Negara.

Oleh karena terjadi deadlock dalam sidang I BPUKI, karena adanya perbedaan pendapat tentang dasar negara, yaitu kelompok nasionalis islam dan nasionalis sekuler, maka BPUPKI kemudian membentuk panitia sembilan yang terdiri dari: Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Soebardjo, AA Maramis, Soekarno, Abu Kahar Moezakir, Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejono dan Agus Salim. Panitia sembilan pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia yang akan merdeka kelak. Rumusan itu dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan lengkapnya adalah: ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada persidangan kedua (10-17 Juli 1945) terjadi perdebatan sengit menyangkut redaksi yang krusial yaitu dengan *kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Persoalan itu akhirnya berakhir ketika Ir. Soekarno menyakinkan peserta sidang bahwa apa yang dihasilkan Panitia 9 dalam bentuk Piagam Jakarta adalah *modus vivendi*, yaitu kesepakatan luhur Bangsa Indonesia. Pendapat Ir.

Soekarno itu akhirnya mampu mengakhiri perdebatan mengenai Sila I Piagam Jakarta dalam Sidang II BPUPKI. Meskipun demikian, atas kebesaran jiwa orang-orang Islam dan demi menjaga persatuan maka rumusan kalimat tersebut akhirnya dihapus dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 (Mahfud, 1987:24).

## **2. Nasionalisme Pasca Proklamasi**

### ***Kemerdekaan***

Dengan diproklamkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara maka cita-cita nasionalisme nomor satu dan dua yang dijelaskan oleh Hertz telah tercapai yaitu persatuan nasional dan kebebasan nasional dari penjajah asing. Namun Belanda dengan membonceng tentara sekutu mendarat di Indonesia dalam upaya merebut dan menduduki kembali Indonesia. Terjadilah bentrok bersenjata di berbagai tempat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga banyak para pahlawan dan syuhada yang gugur di medan perang. Pada 18 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua dan keesokan harinya 19 Desember 1948 Yogyakarta berhasil diduduki Belanda. Pada saat itu para pemimpin republik membiarkan diri ditangkap. Aksi ini mengejutkan dunia sehingga dewan keamanan PBB meminta untuk dilakukan gencatan senjata. Pada 1 Agustus 1949 diumumkan gencatan senjata dan pada 27 Desember 1949 Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, dengan bentuk Republik Indonesia Serikat, tetapi tidak termasuk Papua,. Setelah melalui pergulatan politik sepanjang paruh pertama tahun 1950, akhirnya pada 17 Agustus 1950 semua struktur konstitusional semasa revolusi dihapuskan. Bentuk negara serikat

diganti dengan negara kesatuan dengan Jakarta sebagai ibu kota. Revolusi belum selesai dan Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Semuanya itu menyebabkan berkembangnya radikalisme di penghujung periode 1950an.

Pada era tersebut dicoba kehidupan demokrasi liberal dengan multi partai dan sistem pemerintahan parlementer. Hal itu menyebabkan instabilitas politik, sehingga terjadi banyak perubahan kabinet. Pada ujungnya, pemerintahan tidak efektif pada masa itu. Pada 19 September 1953 Daud Beureuh mengumumkan Aceh sebagai Darul Islam, lepas dari Jakarta. Pada Bulan September 1957 Daud Beureuh menerima gencatan senjata setelah Jakarta mengembalikan Aceh sebagai propinsi sendiri lepas dari Sumatera Utara. Pemberontakan Darul Islam menyebar luas di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Akhirnya semua pemberontakan dapat dipadamkan kemudian pemilihan umum yang pertama dapat diselenggarakan pada Bulan September 1955 dengan menghasilkan empat partai besar yaitu PNI mendapat 22,3% suara dengan 57 kursi, MASYUMI 20,9% dengan 57 kursi, NU 18,4% dengan 45 kursi dan PKI 16,4% dengan 39 kursi dari total kursi yang diperebutkan 257 kursi.

Dekrit 5 Juli 1959 menandai babak baru ketatanegaraan Indonesia yaitu kembali ke UUD 1945 dengan sistem pemerintahan presidensiil, dan akhirnya presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Gelombang radikalisasi terus menguat dengan terus dipelopori oleh kaum muda PKI dan PNI, sehingga terjadi nasionalisasi perusahaan asing, terusirnya warga asing termasuk orang-orang Cina. Pada kurun itu Indonesia berjuang untuk membebaskan Irian Barat dari

penjajahan Belanda dan terlaksana pada 1962. kekuasaan PKI semakin kuat dengan memenangkan banyak kursi pada parlemen daerah. Yang menggeser PNI, PKI mampu memobilisasi massa dalam mendukung pembebasan Irian Barat, dan perlawanan terhadap Malaysia yang dianggap sebagai neo kolonialisme. Masa kejayaan Soekarno berakhir dengan tragedi nasional yaitu pemberontakan PKI dan terbunuhnya beberapa jendral serta pembunuhan masal anggota dan simpatisan PKI.

Dari sini dapat kita lihat nasionalisme indonesia pasca proklamasi kemerdekaan hingga runtuhnya rezim Soekarno mengambil bentuk perlawanan fisik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, pemantapan ideologi bangsa (pancasila), pembuatan undang-undang dasar sebagai pembeda dengan bangsa lain (UUD 1945), nasionalisasi perusahaan asing dan pengusiran warga asing.

Nasionalisme pada era Orde Baru ditandai dengan penegasan kembali jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945 dan penggalian kebudayaan nasional, tetapi pada prakteknya terjadi jiwanisasi dalam segala bidang, baik dalam militer, bahasa, kebudayaan, dll. Orde baru pada awalnya menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia agar mampu membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, ternyata Orde Baru membangun kekuasaannya atas dasar represi hegemoni, sentralistik dan otoriter yang tidak membuka ruang sedikitpun bagi kritik apalagi oposisi, sehingga Orde Baru dapat menciptakan *powerful state* (negara kuat). Kebijakan politik Orde Baru ini mampu membawa stabilitas politik dan keamanan yang tak tertandingi dalam sejarah Republik Indonesia. Akan tetapi, seiring dengan situasi yang terus berubah, dengan masuknya arus globalisasi dan informasi

maka tuntutan masyarakat akan terjadinya transparansi dalam politik dan ekonomi, demokratisasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia semakin tinggi, pada akhirnya rezim Orde Baru tidak mampu menahan tuntutan masyarakat dan runtuhlah rezim tersebut dengan mundurnya presiden Soeharto pada Mei 1998.

Indonesia memasuki reformasi dengan gonjang-ganjing, terjadi pembakaran gereja di Jakarta, pembakaran masjid di Kupang, muncul kasus Sampit, Maluku, Poso dan lepasnya Timor Timur menjadi negara merdeka. Pada era ini Indonesia menghadapi dua proses dis integrasi sekaligus, yaitu *disintegrasi vertical* yang ditandai konflik social antar ras dan antar pusat dan daerah, dan *disintegrasi horizontal* yang ditandai konflik antar suku,ras, agama dan golongan. Pada era ini menguat tuntutan identitas etnis atau *ethno nasionalism* yang disuarakan oleh Timor Timur (sudah merdeka) Aceh (mendapatkan otonomi khusus) dan Irian Jaya. Disamping itu kita juga menyaksikan terjadinya penguatan *primordialisme agama* dengan marak organisasi keagamaan yang radikal dan militant seperti MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam) dll. Serta ada yang menuntut diberlakukannya hukum syariah, dan tuntutan sistem kekhalifahan, seperti Hizbut Tahrir Indonesia.

### 3. *Islam dan Negara*

Sejarah manusia pernah menyaksikan bagaimana persaingan antara gereja dan negara pada abad pertengahan, saat dominasi gereja sangat menonjol, sehingga pengangkatan rajapun harus mendapat restu gereja. Baru pada abad pencerahan dan setelah meletusnya revolusi Perancis dominasi gereja mulai menyusut, sehingga timbullah ajaran

“berikan raja apa yang menjadi haknya dan berikan gereja apa yang menjadi haknya”.

Berkenaan dengan hubungan antara agama dan Negara, Kuntowijoyo mengatakan bahwa dua institusi tersebut berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan, sedang negara adalah kekuatan pemaksa. Agama mempunyai juru dakwah, khatib dan ulama, sedang negara mempunyai birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama mempengaruhi jalannya sejarah dengan kesadaran bersama sedangkan Negara melalui keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam sedangkan negara adalah kekuatan dari luar. Dalam hubungan antara negara dan agama dalam Islam dikenal tiga pemikiran besar yaitu:

Pertama: *unified paradigm* yaitu pemikiran yang menyatukan antara agama dan negara (integrated). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara adalah lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Sedangkan kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik sekaligus. Menurut pandangan ini pemerintah negara diselenggarakan berdasar kedaulatan Tuhan (*divine sovereignty*), karena kedaulatan berasal dari dan berada di tangan Tuhan. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Abu Al’Ala al Maududi, Jamaluddin al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridlo, Sayyid Qutb.

Menurut al Maududi syariat Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara atau antar agama dan politik. Syariat merupakan totalitas pengaturan kehidupan manusia yang tidak ada kekurangannya sedikitpun.

Kedua: *symbiotik paradigm*, pemikiran yang menyatakan bahwa hubungan negara dan agama secara simbiosis, yaitu secara timbal balik dan saling menguntungkan. Dalam hal ini negara membutuhkan agama sebagai

dasar pijak kekuatan moral sehingga ia menjadi mekanisme kontrol, sedangkan agama memerlukan negara sebagai sarana pengembangan. Tokoh aliran ini diantaranya adalah al Mawardi yang berpendapat bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur negara. Pemeliharaan agama dan pengaturan negara merupakan dua dimensi yang berhubungan secara simbiotik.

Ketiga: *secularistic paradigm* pemikiran yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara agama dan negara. Aliran ini menolak hubungan integrated maupun simbiotik.

Diantara tokoh aliran ini adalah Ali Abdur Roziq (1888-1966 M) berpendapat bahwa tugas Nabi Muhammad tidak lebih sekedar mengemban tugas kenabian seperti nabi-nabi sebelumnya. Urusan duniawi oleh nabi Muhammad diserahkan kepada umatnya, termasuk dalam urusan politik. Islam tidak memiliki kaitan apapun dengan sistem kekhalifahan sehingga semua sistem kekhalifahan adalah urusan duniawi (Moesa,2007: 24-27). Islam tidak menetapkan bentuk rezim atau pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin. Islam memberi kebebasan untuk membentuk negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi disekeliling kita, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman (Binder,2001:195).

Dalam kasus Indonesia kita dapat melihat Nurcholis Majid dan Abdurrohman Wahid merupakan tokoh islam akomodatif yang mempunyai pendapat bahwa agama mempunyai wilayah sendiri dan negara mempunyai wilayah sendiri, seakan-akan menyerupai paradigma sekuleristik. Pandangan sedikit berbeda dikemukakan tokoh Islam moderat seperti; Amin Rais



dan Jalaludin Rahmat. Keduanya berpendapat bahwa Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga ideologi. Islam sebagai agama totalistik (kaffah) yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Adapun kelompok radikal yang menginginkan penyatuan negara dan agama dapat kita lihat organisasi Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia. Pemikiran yang lebih keras, bahkan muncul dengan keinginan untuk mendirikan sistem kekhalifahan, seperti yang dilontarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

#### 4. Islam dan Nasionalisme

Sebagaimana bangsa Eropa yang mengenal nasionalisme semenjak abad ke delapan belas, orang Islam- pun tidak mengenal nasionalisme. Pada saat penyebaran agama Islam tidak dikenal kata atau kalimat yang berkonotasi dengan kata nasionalisme. Terminologi yang dipakai untuk menunjukan pada komunitas Islam adalah *al ummah al islamiyyah* yang berarti umat Islam. Istilah yang dapat merujuk kepada nasionalisme baru muncul saat ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir. Saat itu, dia memperkenalkan terminologi *al ummah al misriyyah* yang berarti umat Mesir.

Walaupun demikian kita dapat merunut pada istilah yang digunakan dalam Al-Quran maupun perilaku Rasulullah Muhammad SAW pada waktu berada di kota Madinah. Kata *sya'ab*, *qaum*, *ummah* banyak digunakan Al-Quran untuk merujuk makna "bangsa". Kata *sya'ab* yang menjadi kata tunggal dari *syu'uban* yang tercantun pada surat al-Hujarat (49):13 kita temukan dalam Al-Quran dan terjemahannya yang disusun oleh Departemen Agama mempunyai arti bangsa.

"Wahai manusia kami sesungguhnya telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu

*berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."*

Berdasar pada ayat itu, jelas bahwa Al-Quran telah memperkenalkan konsep bangsa. Kata *qaum* dapat kita jumpai dalam surat Hud (11):63,64,78,84, yang menyebutkan *ya qaumi* yang berarti *wahai kaumku*. Sedang kata *ummah* sering kita jumpai dalam Al-Quran yang menunjuk tidak hanya pada sekelompok manusi (QS 21:92, QS @:143) tetapi juga menunjuk kepada sekelompok hewan (QS 6:38).

Ar-Roqhib (1108 M) seorang pakar bahasa Al-Quran mendefinisikan *ummah* sebagai kelompok yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu atau tempat yang sama, baik perhimpunannya secara terpaksa atau atas kehendak mereka. Sedangkan Ali Syariati seorang cendekiawan Iran mengartikan *ummah* sebagai himpunan manusia yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah, bahu membahu, dan bergerak secara dinamis dibawah kepemimpinan bersama. (Shihab, 1996:326-332).

Rujukan kedua dalam menegakkan nasionalisme adalah tindakan Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah. Saat itu, Rasulullah mengikat seluruh penduduk Madinah untuk mengadakan perjanjian yang disebut *piagam Madinah*. Piagam itu dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya *nation state* oleh Montgomery Watt dan Bernard Lewis (Moesa, 2007:241). Madinah saat itu dihuni oleh kaum Anshor yaitu penduduk asli yang telah memeluk Islam, dan kaum Muhajir yang berasal dari Mekah dan menetap bersama Nabi atau setelah itu. Kaum Anshor sendiri terdiri dari suku Aus dan Khozroj. Kaum muslim bukanlah satu-satunya yang menghuni kota Madinah. Disamping muslim menghuni juga kaum Yahudi,

Kristen, Majusi (penyembah api) dan sisa-sisa orang Arab yang masih menyembah berhala. Piagam Madinah merupakan landasan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi penduduk Madinah yang majemuk. Isi pokok piagam Madinah antara lain: pertama, semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku merupakan satu komunitas. Kedua, hubungan antara sesama komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan non Islam didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membantu mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama (Sjadzali, 1993:13-14).

Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menyatakan bahwa unsur-unsur nasionalisme dapat ditemukan dalam Al-Quran:

1) Persamaan keturunan

Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari berbagai ras, suku dan bangsa agar tercipta persaudaraan dalam rangka menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Al-Quran sangat menekankan kepada pembinaan keluarga yang merupakan unsur terkecil terbentuknya masyarakat, dari masyarakat terbentuk suku, dan dari suku terbentuk bangsa, sebagaimana dalam Al-Quran 7:160 dan mereka kami bagi menjadi duabelas suku yang masing-masing menjadi umat (bangsa), dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya (bangsanya) meminta air kepadanya, "pukullah batu itu dengan tongkatmu" maka memancarlah darinya dua belas mata air.

Rasulullah sendiri dalam perjuangannya di Makkah justru mendapat pembelaan dari keluarga

besarnya. Sejalan dengan itu Muhammad SAW bersabda: sebaik-baiknya kamu adalah pembela keluarga besarnya selama pembelaannya itu bukan dosa (HR Abu Daud dari Suroqoh bin Malik). Hanya saja pengelompokan dalam suku bangsa tidak boleh menyebabkan fanatisme buta, sikap superioritas dan penghinaan terhadap bangsa lain. Nabi bersabda: tidaklah termasuk dalam golongan kita orang yang mengajak kepada *ashobiyyah* (fanatik buta terhadap kelompok), bukan pula yang berperang atas dasar *ashobiyyah*, bukan pula yang mati dengan mendukung *ashobiyyah* (HR Abu Daud dari Jubair bin Muth'im).

2) Persamaan bahasa

Bahasa pada hakikatnya bukan hanya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi pikiran dan tujuan, tapi untuk memelihara identitas dan sebagai pembeda dari komunitas lain. Jadi bahasa dapat merupakan perekat terjadinya persatuan umat atau bangsa. Sahabat-sahabat Rasulullah ketika meremehkan sahabat Salman (berasal dari Persia), Suhaib (berasal dari Romawi) dan Bilal (dari Ethiopia) maka Rasulullah bersabda: kebangsaan Arab yang ada pada diri kalian bukanlah karena bapak atau ibu melainkan dari bahasa, maka barang siapa berbicara bahasa Arab maka dia adalah bangsa Arab.

3) Persamaan adat istiadat

Adat istiadat menurut pakar hukum Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dipertimbangkan sebagai hukum. Allah menandakan dalam QS 3:104 *hendaklah ada sekelompok diantara kamu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.*

Demikian pula dalam QS 7:199 *jadilah engkau pemaaf, perintahkan yang 'urf (adat istiadat yang baik), dan berpalinglah dari orang jahil*

Pada kedua ayat tersebut kata *'urf* dan *alma'ruf* dimaksudkan sebagai adat istiadat dan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi jelas bahwa adat istiadat sebagai salah satu pembentuk bangsa tidaklah bertentangan dengan Islam.

4) Persamaan sejarah

Persamaan sejarah masa lalu, persamaan senasib dan sepenanggungan masa kini serta persamaan tujuan masa akan datang merupakan salah satu faktor yang mendominasi terbentuknya suatu bangsa. Sejarah yang gemilang masa lalu selalu dibanggakan generasi berikutnya, demikian pula sebaliknya. Al-Quran pun sangat menonjol dalam menguraikan sejarah dengan tujuan untuk diambil pelajaran guna menentukan langkah berikutnya. Jadi unsur kesejarahan sejalan dengan Al-Quran.

5) Cinta tanah air

Cinta tanah air tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan inklusif dalam ajarannya dan praktik Nabi Muhammad SAW. Cinta beliau kepada tanah air tampak pula ketika beliau meninggalkan kota Makkah seraya berucap: *Demi Allah, sesungguhnya adalah bumi Allah yang paling aku cintai, seandainya orang yang bertempat tinggal di sini tidak mengusirku niscaya aku tidak meninggalkannya.*

Demikian pula pada saat beliau sudah tinggal di Madinah dan menjadi warga kota, beliau memohon kepada Allah: *Ya Allah cintakan kota Madinah kepada kami, sebagai mana engkau mencintakan kota Makkah kepada kami* (HR Bukhari, Malik dan Akhmad).

Orang yang gugur dalam mempertahankan keluarga, harta dan negeri sendiri dinilai sebagai syahid, sebagaimana gugur dalam membela agama, bahkan agama menggandengkan pembelaan agama

dan pembelaan negara dalam QS 60:8-9 *Allah tidak melarang kamu berbuat baik, dan memberi sebagian hartamu (berbuat adil) kepada orang yang tidak memerangi kamu karena, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu berkawan dengan orang-orang yang memerangi kau karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain mengusirmu.*

**5. Islam dan Nasionalisme di Indonesia**

Dalam konteks nasionalisme Indonesia dan hubungannya dengan Islam kita dapat mengambil kasus NU (Nahdliul Ulama) sebagai studi kasus sebagai berikut.

1. NU dalam keputusan ijtihad politiknya dalam muktamar di Banjarmasin tahun 1936 mengambil keputusan bahwa negara dan tanah air Indonesia yang masih dijajah Belanda wajib dilestarikan berdasarkan hukum fiqh' Islam. Indonesia saat mendapat kemerdekaan bukan berbentuk negara Islam (Darul Islam) atau negara perang (Darul Harb) melainkan negara damai (Dar'as Shulh).
2. Resolusi jihad yang dilontarkan oleh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 yang isinya sebagai berikut: kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan, RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang wajib dibela dan dipertahankan, warga NU wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda.
3. Memberi gelar pemegang kekuasaan yang sah secara de facto dalam keadaan darurat kepada presiden Soekarno dalam menumpas pemberontakan yang terjadi dimana-mana.
4. Keputusan menerima asas tunggal Pancasila dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

adalah final sesuai dengan muktamar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984.

5. Keputusan NU tentang wawasan kebangsaan dalam muktamar NU ke 29 di Tasikmalaya pada tahun 1994 yang isinya antara lain: NU memandang bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan universalisme Islam bahkan nasionalisme bisa menjadi sarana untuk memakmurkan bumi Allah sebagai amanat-Nya dan sejalan dengan budaya yang dimiliki oleh bangsa, pluralitas yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya, dan sebagainya adalah merupakan *sunnatullah* dan rahmat dalam sejarah Islam, memberikan jaminan bertoleransi, kebersamaan, keadilan, dan kejujuran.

Dari berbagai keputusan muktamar NU dapatlah ditarik kesimpulan bahwa NU telah menunjukkan sikap nasionalisme sejak zaman penjajahan Belanda, karena hal tersebut dilandasi ajaran ahlussunnah waj jama'ah yang menganut prinsip *tawassut* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *ta'adul* (keadilan), *tasamuh* (toleransi)

#### IV. SIMPULAN

Akar-akar nasionalisme ternyata dapat diketemukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam kehidupan Nabi Mahammad SAW. Hal inilah yang membuat kalangan Islam nasionalis berani memperjuangkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa mendasarkan diri formalisasi syariat Islam. Kelompok ini menyatakan bahwa kehidupan spiritual diatur oleh agama sedangkan kehidupan duniawi diatur oleh logika duniawi. Pemikiran ini seakan-akan mengandung unsur sekularistik, yaitu adanya pemisahan agama dengan dunia, meskipun sejatinya hanya pemisahan wilayah. Pemikiran seperti dapat mengalirkan pemikiran "Islam politik" ke *Islam kultural*. Tokoh kelompok ini adalah Nurcholis Madjid, Abdurrohman Wahid. Dipihak lain

terdapat golongan yang berusaha mengadakan politisasi agama dan agamisasi politik. Politisasi agama berarti menggunakan simbol-simbol agama untuk menggerakkan massa, mengaduk-aduk emosi keagamaan, menjalin kekuatan di parlemen demi tujuan untuk menjadikan agama sebagai alat dari *political engineering*. Agamisasi politik berarti menjadikan politik yang semestinya ranah publik ditarik keranah privat yang menjadi urusan agama. Urusan politik menjadi urusan agama dan perjuangan politik menjadi perjuangan agama, hal ini bisa mengarah ke berdirinya negara "teokrasi".

#### CATATAN

---

1. Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralisme* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
2. Binder, Leonard, *Islam Liberal. Kritik terhadap ideologi pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
3. Black, Anthony *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006).
4. Feillard, Andree, *NU vas-a-vis Negara. Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2008).
5. Hayes, Carlton J.H, 1955. *The Historical Evolution Of Modern Nationalism*. New York. The Macmillan Company.
6. Hobsbawn, E.J., *Nasionalisme Menjelang Abad XXI* (Yogyakarta: Yogyakarta Tiara Wacana, 1992).
7. Kohn, Hans, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya* (Jakarta: Erlangga, 1984).
8. Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siasyah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*

- (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006).
9. Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qura* (Bandung: Mizan, 2006).
  10. Ricklefs, M.C, *Sejarah indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2001).
  11. Saul, John Ralston, *Runtuhnya Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
  12. Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara. Ajaran, sejarah dan Pemikiran* (Jakarta:UI Press, 1993).
  13. Yapeta Pusat, *Sejarah Lahirnya Pancasila* (Jakarta:Yayasan Pembela Tanah Air, 1995).

